

550/561 EKONOMI PEMBANGUNAN

**LAPORAN PENELITIAN
PEMULA**



**ANALISIS POTENSI DAERAH DAN SEKTOR
BASIS DI PROPINSI JAWA BARAT**

Oleh:

**Drs. Suhartono, M.Si
Ir. Tri Kurniawati, M.Si**

**UNIVERSITAS TERBUKA
OKTOBER 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Analisis Potensi Daerah Dan Sektor Basis Di Propinsi Jawa Barat
Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : Drs. SUHARTONO M.Si
NIDN : 0023076301
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Nomor HP :
Surel (e-mail) : tono@ut.ac.id
Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : Ir. TRI KURNIAWATI RETNANINGSIH M.Si
NIDN : 0013035902
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS TERBUKA
Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 15.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 15.000.000,00



Tangerang Selatan, 24 - 12 - 2013,
Ketua Peneliti,

(Drs. SUHARTONO M.Si)
NIP/NIK 196307231998021001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Analisis Sektoral	6
B. Teori <i>Export Base</i>	7
C. <i>Shift and Share</i>	8
D. Penelitian Terdahulu	11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	13
A. Jenis dan Sumber Data	13
B. Definisi Operasional Variabel	13
C. Model dan Alat Analisis.....	14
1. Analisis <i>Location Quotient (LQ)</i>	14
2. Model <i>Shift Share (Mix and Share)</i>	15
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	17
A. Keadaan Umum Daerah Penelitian.....	17
1. Keadaan Geografis dan Demografis Provinsi Jawa Barat	17

2. Keadaan Penduduk.....	17
3. Keadaan Ekonomi.....	19
B Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	22
C. Analisis Shift Share	27
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI	30
A. Simpulan.....	30
B. Implikasi	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2010	3
Tabel 4.1.	Jumlah Penduduk Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin.....	18
Tabel 4.2.	Struktur Ekonomi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2000 Distribusi PDRW Propinsi Jawa Barat Tahun 2011-2012 (dalam persen).....	20
Tabel 4.3.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Menurut Kelompok Sektor/Sektor Tahun 2011-2012	21
Tabel 4.4	LQ PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku 2000 Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012	23
Tabel 4.5.	Peringkat Investasi PMA Di Jawa Barat Menurut Negara Asal Sampai Dengan Periode Laporan Jan-Des 2011	25
Tabel 4.6.	Jumlah Industri di Jawa Barat	26
Tabel 4.7.	Perhitungan Shift Share Secara Sektoral Menurut Lapangan Usaha Propinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Perhitungan Analisis Basis Per Sektor Propinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012	31
Lampiran 2. Hasil Perhitungan Shift Share Per Sektor Propinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan *merangsang* pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Namun demikian, pada umumnya para ekonom memberikan pengertian sama untuk kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP saja. Sedangkan tujuan utama yang ingin dicapai dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan tingkat pengangguran. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Proses pembangunan ekonomi selalu ditandai dengan adanya perubahan terhadap pendapatan per kapita masyarakat dan berbagai *macam* transformasi struktur sosial ekonomi masyarakat. Proses transformasi struktural atau proses perubahan komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut sektor dan sub sektor merupakan salah satu yang penting dari proses pembangunan ekonomi suatu daerah.

Struktur perekonomian dalam suatu wilayah merupakan faktor dasar yang membedakan keadaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi dan potensi suatu wilayah. Perbedaan berbagai sumbangan sektor perekonomian yang dibagi menjadi sembilan sektor ekonomi menurut lapangan usaha akan

memberikan indikator tentang keadaan perekonomian suatu daerah. Besar kecilnya kemampuan sektor-sektor dalam meningkatkan produksinya berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah. Perubahan yang terjadi terhadap peranan sektor tersebut terhadap produk Domestik Bruto Daerah, akan menimbulkan pula perubahan dalam struktur ekonomi daerah.

Pembangunan daerah Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan permasalahan pembangunan di daerah. Sebagai prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat meletakkan pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi melalui terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang di berbagai sektor.

Struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2008-2010, sector industri pengolahan memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB yaitu sebesar Rp 133.756.556 juta pada tahun 2008 atau sebesar 45,93 persen dan Rp 135.246.774 juta pada tahun 2010 atau sebesar 42 persen.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat atas
Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha
Tahun 2008-2010

No.	Sektor	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Pertanian	37.139.985	41.722.076	42.137.486
2	Pertambangan dan Penggalian	6.850.433	7.424.424	7.464.691
3	Industri dan Pengolahan	133.756.55	131.432.865	135.246.774
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	6 5.985.767	6.839.237	7.315.960
5	Bangunan / Konstruksi	9.730.820	10.299.411	11.810.047
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	56.937.923	62.701.714	70.083.413
7	Pengangkutan dan T elekomunikasi	12.233.940	13.209.254,	15.352.858
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9.075.520	9.618.612	10.564.691
9	Jasa-jasa	19.494.893	20.157.658	21.899.922
PDRB dengan <i>Minyak</i> dan <i>Gas</i> Bumi		291.205.837	303.405.251	321.875.841
PDRB tanpa <i>Minyak</i> dan <i>Gas</i> Bumi		282.745.299	294.324.392	312.842.537

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka 2011, BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan struktur ekonomi sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling dominant dalam sumbangan terhadap PDRB yaitu sebesar 42 persen dan diikuti dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,41 persen dan selanjutnya sektor pertanian sebesar 12,61 persen.

B. Perumusan Masalah

1. Sektor-sektor manakah sebagai sektor basis di Provinsi Jawa Barat?
2. Sektor-sektor manakah yang mengalami pertumbuhan lebih cepat di Provinsi Jawa Barat?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada masalah struktur ekonomi (PDRB) menurut lapangan usaha dalam tahun 2010-2012 di Provinsi Jawa Barat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor basis di Provinsi Jawa Barat.
- b. Untuk mengetahui sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan lebih cepat di Provinsi Jawa Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi pengambil keputusan (Pemerintah Daerah) di Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
- b. Sebagai bahan referensi untuk dikembangkan sehingga dapat menjadi pedoman dalam menggerakkan ekonomi daerah.

- c. Sebagai bahan informasi dan tambahan ilmu bagi penulis khususnya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi wilayah khususnya dalam hal kesempatan kerja di daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Sektoral

Suatu perekonomian secara umum dapat dianalisis pada dua aspek, yaitu analisis aspek sektoral dan analisis aspek-aspek regional. Kajian tersebut dapat dilakukan untuk tingkat ekonomi nasional, maupun untuk tingkat ekonomi daerah (lokal).

Analisis aspek sektoral, baik perekonomian tingkat *nasional*, tingkat regional (sub nasional), maupun tingkat subregional perekonomian dilihat berdasarkan sektor-sektor kegiatan ekonomi atau lapangan usaha penduduk. Hingga saat ini sektor-sektor kegiatan ekonomi atau lapangan usaha penduduk dibagi menjadi 9 (sembilan) sektor, yaitu:

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan/Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum
5. Sektor Bangunan dan Konstruksi
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Sektor Angkutan dan Komunikasi
8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Sektor Jasa-jasa

Dari 9 sektor di atas dikelompokkan lagi menjadi 3 sektor yaitu:

1. Sektor primer meliputi pertanian, pertambangan dan galian.
2. Sektor sekunder meliputi industri dan pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan/konstruksi.
3. Sektor tersier meliputi perdagangan, komunikasi, angkutan, keuangan dan jasa.

B. Teori *Export Base*

Teori *Export Base* atau teori *Economic Base*, pertama kali dikembangkan oleh Douglas C. North pada tahun 1955. Menurut North, pertumbuhan wilayah jangka panjang tergantung pada kegiatan industri ekspornya (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997 : 223). Kekuatan *utama* dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor. Dengan kata lain, permintaan komoditas ekspor akan membentuk keterkaitan ekonomi, baik ke belakang (kegiatan produksi) maupun ke depan (sektor pelayanan).

Suatu wilayah memiliki sektor ekspor karena sektor itu menghasilkan keuntungan dalam memproduksi barang dan jasa, mempunyai sumber daya yang unik untuk memproduksi barang dan jasa, mempunyai lokasi pemasaran yang unik, dan mempunyai beberapa tipe keuntungan transportasi. Dalam perkembangannya, perekonomian wilayah cenderung membentuk kegiatan pendukung yang dapat menguatkan posisi yang menguntungkan dalam sektor ekspor di wilayah itu. Penekanan teori ini ialah pentingnya keterbukaan wilayah yang dapat meningkatkan aliran modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan wilayah.

Teori *Export Base* mengandung daya tarik intuitif dan kesederhanaan, seperti halnya dianggap sebagai dasar teori, berdasarkan konsep beberapa sektor ekonomi lokal mengantarkan kekuatan ekonomi eksternal ke dalam wilayah untuk menstimulasikan perubahan secara cepat. Sasaran pertama dan utama teori *Export Base* adalah teori *Economic Base* lebih tepat diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang kecil dengan ekonomi sederhana dan untuk penelitian jangka pendek tentang pengembangan ekonomi wilayah. Dalam kasus yang lebih besar, semakin kompleks perekonomian

dan semakin panjang analitis pertumbuhan wilayahnya, variabel-variabel lain dapat berperan penting seperti ekspor. Kedua, teori *Economic Base* gagal menjelaskan bagaimana pengembangan wilayah dapat terjadi walaupun terjadi penurunan ekspor, sedangkan di lain pihak sektor non ekspor lainnya dapat tumbuh untuk mengimbangi penurunan itu.

Teori *Economic Base* atau *Export Base* menjadi dasar pemikiran bagi model analisis *Location Quotient* yang mengukur konsentrasi daripada sesuatu kegiatan atau industri di suatu daerah dengan jalan membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan/ industri yang sama dalam perekonomian nasional (Kadariah, 1982: 70).

Analisis LQ merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi (Yusuf, 1999). Variabel yang digunakan dalam perhitungan basis ekonomi tersebut adalah PDRB wilayah dari suatu kegiatan yang dititikberatkan pada kegiatan dalam struktur ekonomi wilayah. LQ adalah suatu teknik perhitungan yang mudah untuk menunjukkan spesialisasi relatif (kemampuan) wilayah dalam kegiatan atau karakteristik tertentu (Rondinelli, 1985). Teknik ini tidak atau belum memberikan kesimpulan akhir, tetapi baru merupakan kesimpulan sementara yang masih harus dilanjutkan dengan teknik analisis lain. Namun demikian sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan daerah yang bersangkutan dalam sektor yang diamati (Warpani, 1984). Teknik ini menyajikan perbandingan antara kemampuan suatu sektor di daerah yang sedang diteliti dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas.

C. *Shift and Share*

Analisis *shift-share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian wilayah yang lebih luas (wilayah referensi) selama selang

waktu tertentu yang biasanya ditentukan oleh para pengguna analisis ini. Tujuan dari analisis *shift-share* ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih luas (wilayah referensi). Dengan demikian analisis ini akan memberikan hasil perhitungan yang dapat menentukan posisi baik itu berupa kelemahan atau kekuatan, dari sektor/industri di daerah dibandingkan dengan industri yang sama di wilayah referensinya.

Hoover (1977) menjelaskan bahwa tidak pantas apabila kita hanya menjelaskan beberapa penyebab saja dari perkembangan dan pertumbuhan perekonomian wilayah. Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses pertumbuhan di suatu wilayah terjadi adalah dengan menggunakan analisis *shift-share*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa analisis *shift-share* dapat digunakan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai struktur perekonomian suatu wilayah, melalui komponen-komponen pertumbuhan. Analisis *shift-share* tidak dapat menjelaskan mengapa perubahan itu terjadi, analisis hanya merupakan signal bagi para pengambil keputusan yang ada di daerah agar mau mencari informasi sekaligus menginvestigasi lebih jauh lagi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menentukan mengapa suatu industri memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan industri yang sama di wilayah referensinya dan mengapa industri yang lain tidak? (Materi Diklat Konsep Dasar Penilaian Perencanaan Daerah, LP3E-FE-UNPAD, 2007).

Ada dua komponen penting dalam analisis *Shift Share*, yaitu:
[Oppenheim, 1980: Bendavid-Val, 1991]

1. *Differential Shift* (Wilayah Studi), dengan melihat perubahan pertumbuhan dari suatu kegiatan di wilayah studi terhadap kegiatan tersebut di wilayah referensi. Dari perubahan tersebut akan dapat dilihat berapa besar penambahan atau pengurangan pendapatan dari kegiatan tersebut.

2. *Proportionality Shift* (Wilayah Referensi), melihat perubahan pertumbuhan suatu kegiatan di wilayah referensi terhadap kegiatan total (PDRB) di wilayah referensi.

Kedua komponen tersebut memberikan nilai perubahan baik pengurangan maupun penambahan pendapatan.

Analisis *Shift Share* memberikan data dan informasi tentang kinerja perekonomian ke dalam tiga bidang yang saling terintegrasi, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan komponen "*share*" untuk melihat perubahan perekonomian daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Jika suatu wilayah tumbuh dengan tingkat yang sama dengan pertumbuhan nasionalnya maka wilayah tersebut akan dapat mempertahankan sumbangannya terhadap perekonomian nasional $H \rightarrow [Komponen G]$.
2. Pergeseran proporsional [*industry mix/bauran industri* atau *proportional shift*], pengukuran ini dapat mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian nasional. $\rightarrow (Komponen M)$.
3. Pergeseran differential (*regional share* atau *differential shift/keunggulan kompetitif*), dapat membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing sektoral suatu daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. (*Komponen S*).

Komponen kedua dan ketiga (*component mix/M* dan *competitive component/S*) disebut sebagai komponen "*Shift (M + S)*" dalam analisis "*Shift-Share*".

$$y_{it} - y_{io} = \Delta y = Y_{io} \left\{ \frac{[Y_t/Y_o] - 1}{[G]} \right\} + y_{io} \left\{ \frac{[Y_{it}/Y_{io}] - [Y_t/Y_o]}{[M]} \right\} + y_{io} \left\{ \frac{[y_{it}/y_{io}] - [Y_{it}/Y_{io}]}{[S]} \right\}$$

Perhitungan analisis *shift share* diperoleh dengan menjumlahkan ketiga komponen di atas dan hasilnya harus sama dengan total perubahan dari data industri/sektor yang ada di daerah (ΔY).

Keterangan:

y_{io} = Jumlah output sektor i daerah di tahun awal
 y_{it} = Jumlah output sektor i daerah di *tahun* akhir
 Y_{io} = Jumlah output sektor i nasional di tahun awal
 Y_{it} = Jumlah output sektor i nasional di tahun akhir
 Y_o = Jumlah total output nasional di tahun awal
 Y_t = Jumlah total output nasional di tahun akhir

(Bendavid-Val, 1991 : 73-76, Budiharsono, 2001:111-135, Prasetyo, 2001: 41-53, Mujarijadi, 2003:47-66).

Komponen kedua dan ketiga (*Pergeseran Proporsional* dan *Pergeseran Differensial*) sering disebut sebagai komponen "*Shift*" (PP + PD) dalam *shift-share analysis*. Nilai dari komponen ini dapat dijadikan acuan pada analisis *shift-share* yaitu jika didapatkan nilai *shift* dari suatu sektor adalah positif, maka sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor yang relatif lebih maju dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat nasional, dan sebaliknya jika nilai *shift* dari suatu sektor adalah negatif maka sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor yang mundur.

Yang dimaksud dengan sektor yang maju adalah perkembangan sektor tersebut pada periode berikutnya dinilai relatif lebih baik dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah referensinya, dan sebaliknya yang dimaksud dengan sektor yang mundur adalah perkembangan sektor tersebut pada periode selanjutnya dinilai lebih buruk dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah referensinya.

D. Penelitian Terdahulu

Fatmasari dalam penelitiannya yang berjudul: "Kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat" dalam tahun 1994-2003 diperoleh hasil bahwa secara umum di Provinsi Jawa Barat sektor pertanian tetap merupakan sektor basis sebagai kontribusi dari kabupaten-kabupaten yang jauh dari pusat ibukota provinsi. Tetapi adanya transformasi

teknologi yang berkembang pesat dan didukung dengan topografi wilayah Jawa Barat yang sebagian besar mengelilingi kota metropolitan menyebabkan sektor basis Jawa Barat *ada* kecenderungan bergerak ke arah industri. Dari hasil analisis *shift share* masing-masing kabupaten/kota pertumbuhan ekonominya lebih lambat daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang dalam penulisannya dimaksudkan untuk menjabarkan/menggambarkan sektor-sektor ekonomi berdasarkan kondisi wilayah. Analisis dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dengan alat analisis berupa formula-formula yang berhubungan dengan permasalahan.

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Struktur perekonomian dalam penelitian ini merupakan komposisi/kontribusi dari kegiatan produksi secara sektoral menurut lapangan usaha yang mengacu pada klasifikasi yang telah dibuat oleh Biro Pusat Statistik yang terdiri dari 9 sektor lapangan usaha utama, yaitu: 1. Pertanian, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Listrik, gas dan air minum, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, hotel dan restoran, 7. Pengangkutan dan komunikasi, 8. Keuangan, persewaan dan asuransi, dan 9. Jasa-jasa lainnya.
2. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap daerah dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam rupiah. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 sektor lapangan usaha yang dikelompokkan lagi menjadi 3 sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Data PDRB yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB tahun 2006.

3. Sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuan.
4. Potensi ekonomi adalah semua sumberdaya yang perlu diproses/ diolah untuk memenuhi kebutuhan terutama untuk mencapai kemakmuran/ kesejahteraan.

C. Model dan Alat Analisis

1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis LQ merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi (Yusuf, 1999). Variabel yang digunakan dalam perhitungan basis ekonomi tersebut adalah PDRB wilayah dari suatu kegiatan yang dititikberatkan pada kegiatan dalam struktur ekonomi wilayah. LQ adalah suatu teknik perhitungan yang mudah untuk menunjukkan spesialisasi relatif (kemampuan) wilayah dalam kegiatan atau karakteristik tertentu (Rondinelli, 1985).

Teknik ini menyajikan perbandingan antara kemampuan suatu sektor di daerah yang sedang diteliti dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas.

Kontribusi sektor ekonomi di kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat digunakan formulasi model LQ sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Y_{ij} / Y_j}{Y_i / Y}$$

LQ = *Location Quotient*

Y_{ij} = PDRB dari sektor i pada daerah kabupaten/kota ke j

Y_j = PDRB di daerah kabupaten/kota ke j

Y_i = PDRB Provinsi dari sektor i

Y = PDRB Provinsi

Kriteria yang digunakan adalah :

- Bila $LQ > 1$, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis/sektor ekspor, yang artinya bahwa sektor tersebut disamping mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri/lokal juga dapat memenuhi daerah lain/ekspor.
- Bila $LQ < 1$, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non basis/sektor lokal, yang artinya sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri/lokal.

2. Model *Shift Share (Mix and Share)*

Analisis ini untuk menunjukkan sektor-sektor yang berkembang di suatu wilayah dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional. Pada dasarnya analisis *shift share* melihat pertumbuhan dari suatu kegiatan terutama melihat perbedaan pertumbuhan, baik dalam skala yang lebih luas (wilayah referensi) maupun dalam skala yang lebih kecil.

Analisis dapat digunakan untuk menganalisis perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja, pada dua titik waktu di suatu wilayah.

Analisis ini menggambarkan *performance* (kinerja) perekonomian nasional, yang dapat ditunjukkan adanya *shift* (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah bila daerah itu memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional.

Analisis ini juga membandingkan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya yang mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan itu. Bila penyimpangan itu positif, hal itu terdapat daya saing (keunggulan kompetitif) dari suatu sektor dalam wilayah tersebut.

Model *Shift Share*

$$y_{it} - y_{io} - \Delta y = y_{io} \left\{ \left[\frac{Y_t}{Y_o} \right] - 1 \right\} + y_{io} \left\{ \left[\frac{Y_{it}}{Y_{io}} \right] - \left[\frac{Y_t}{Y_o} \right] \right\} + y_{io} \left\{ \left[\frac{y_{it}}{y_{io}} \right] - \left[\frac{Y_{it}}{Y_{io}} \right] \right\}$$

[G] [M] [S]

Perhitungan analisis *shift share* diperoleh dengan menjumlahkan ketiga komponen di atas dan hasilnya harus sama dengan total perubahan dari data industri/sektor yang ada di daerah (ΔY). (*Bendavid-Val, 1991:73-76, Schaffer, 1999:9-10*).

Keterangan :

y_{io} = Jumlah output sektor i daerah di tahun awal

y_{it} = Jumlah output sektor i daerah di tahun akhir

Y_{io} = Jumlah output sektor i nasional di tahun awal

Y_{it} = Jumlah output sektor i nasional di tahun akhir

Y_o = Jumlah total output nasional di tahun awal

Y_t = Jumlah total output nasional di tahun akhir

Interpretasi: (*Bendavid-Val, 1991:73-76, Schaffer, 1999: 9-10*).

- Nilai dari tiap komponen Shift Share (G+S+M) dapat dijadikan acuan dalam analisis.
- Jika nilai dari komponen **Shift** dari suatu sektor positif (+), maka sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor yang relatif maju dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat nasional.
- Jika pergeseran differensial (komponen S) dari suatu sektor positif maka sektor tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang sektor yang sama pada perekonomian nasional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Laporan Penelitian Mandiri

1. Keadaan Geografis dan Demografis Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang merupakan pintu gerbang dengan DKI Jakarta. Secara administratif Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 26 Daerah Tingkat II yaitu 17 kabupaten dan 9 kota.

Letak daratannya dari barat laut ke tenggara. Dilihat dari permukaan tanah/daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah yang umumnya terletak di sepanjang pantai utara pulau Jawa, sedangkan sebagian lagi termasuk pada dataran tinggi.

Secara geografis terletak di antara $5^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 50'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}48'$ - $108^{\circ}48'$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil digitasi batas wilayah, luas wilayah Provinsi Jawa Barat mencapai 3.711.654,00 hektar. Daratan Jawa Barat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpi); wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10-1.500 m dpi; dan wilayah daratan luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0-10 m dpi.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010) adalah 43.021.826 orang dengan

komposisi 21.876.572 laki-laki dan 21.145.254 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan *sex ratio* sebesar 103.

Persebaran penduduk antar wilayah di Jawa Barat sangat bervariasi. Kabupaten Bogor merupakan wilayah administrasi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat yaitu sebanyak 4.763.206 orang, disusul Kabupaten Bandung sebanyak 3.174.499 orang dan Kabupaten Bekasi di urutan ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 2.629.551 orang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

No.	Kabupaten / Kota	Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Total	Seks Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bogor	2.446.251	2.316.958	4.763.209	105
2	Kab. Bandung	1.617.513	1.556.986	3.174.499	103
3	Kab. Bekasi	1.345.500	1.284.051	2.629.551	104
4	Kab. Garut	1.216.139	1.185.109	2.401.248	102
5	Kota Bandung	1.213.718	1.179.915	2.393.633	102
6	Kab. Sukabumi	1.191.489	1.147.859	2.339.348	103
7	Kota Bekasi	1.182.496	1.153.993	2.336.489	102
8	Kab. Cianjur	1.120.550	1.047.964	2.168.514	106
9	Kab. Karawang	1.095.202	1.030.032	2.125.234	106
10	Kab. Cirebon	1.057.501	1.007.641	2.065.142	104
11	Kota Depok	879.325	857.240	1.736.565	102
12	Kab. Tasikmalaya	835.052	840.492	1.675.544	99
13	Kab. Indramayu	856.190	807.3261	1.663.516	106
14	Kab. Ciamis	757.729	773.630	1.531.359	97
15	Kab. Bandung Barat	771.729	741.905	1.513.634	104
16	Kab. Subang	737.398	724.958	1.462.356	101
17	Kab. Majalengka	582.783	583.950	1.166.733	99
18	Kab. SumedanjL	546.389	544.934	1.091.323	100
19	Kab. Kuningan	521.556	516.002	1.037.558	101
20	Kota Bogor	484.648	464.418	949.066	104
21	Kab. Purwakarta	435.307	416.259	851.566	104
22	Kota Tasikmalaya	320.859	313.565	634.424	102
23	Kota Cimahi	273.900	267.239	541.139	102
24	Kota Sukabumi	152.193	147.054	299.247	103
25	Kota Cirebon	148.095	147.669	295.764	100
26	Kota Banjar	87.060	88.105	175.165	98
	Jawa Barat	21.876.572	21.145.254	43.021.826	103

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (Hasil Sensus Penduduk 2010)

Kota Banjar, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi adalah tiga kota yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya di Jawa Barat. Penduduk Kota Banjar sebanyak 175.165 orang, penduduk kota Cirebon sebanyak 295.764 orang dan penduduk Kota Sukabumi sebanyak 299.247 orang.

Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Ciamis merupakan tiga wilayah administrasi yang memiliki laju pertumbuhan penduduk paling rendah di Jawa Barat, yaitu masing-masing 0,40 persen Kabupaten Majalengka, 0,46 persen Kabupaten Indramayu dan 0,47 persen Kabupaten Ciamis. Kabupaten/kota lain yang memiliki laju pertumbuhan penduduk kurang dari 1 persen adalah Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0,88 persen, Kabupaten Kuningan sebesar 0,53 persen, Kabupaten Cirebon sebesar 0,68 persen, Kabupaten Subang sebesar 0,96 persen dan Kota Cirebon sebesar 0,84 persen.

Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 37.116,54 kilo meter per segi (sumber : hasil digitasi batas wilayah) dan jumlah penduduk sebanyak 43.021.826 orang, memiliki kepadatan penduduk 1.159 orang per kilo meter persegi, Kota Bandung dan Kota Cimahi memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Kepadatan penduduk Kota Bandung adalah 14.228 orang per kilo meter persegi, sedangkan kepadatan penduduk Kota Cimahi adalah 13.134 orang per kilo meter persegi.

3. Keadaan Ekonomi

a. Struktur Ekonomi

Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan potensi perekonomian suatu wilayah. Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan *gambaran* bahwa sektor tersebut merupakan sektor *andalan* yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong roda perekonomian semakin berkembang.

Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusi terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB, sehingga tampak sektor-sektor andalan yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah yang bersangkutan.

Tabel 4.2
Struktur Ekonomi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku 2000 Distribusi PDRW
Propinsi Jawa Barat Tahun 2011-2012 (dalam persen)

Lapangan Usaha	2011	2012
(1)	(2)	(3)
1. PRIMER	14,99	13,38
1) Pertanian, perkebunan, peternakan	11,98	11,52
2) Pertambangan dan penggalian	2,02	1,86
2. SEKUNDER	43,70	42,59
3) Industri pengolahan	37,16	35,79
4) Listrik, Gas dan air bersih	2,55	2,51
5) Bangunan/konstruksi	3,99	29,29
3. TERSIER	42,30	44,04
6) Perdagangan, hotel dan restoran	22,58	23,90
7) Pengangkutan dan komunikasi	7,70	7,74
8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	2,84	2,95
9) Jasa-jasa	9,17	9,40
PDRB	100	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Struktur ekonomi Jawa Barat dapat dijelaskan menurut kelompok sektor primer, sekunder dan tersier. Pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Barat berdasarkan harga berlaku sebesar 13,38%. Kontribusi sektor primer terbesar masih disumbang sektor

pertanian sebesar 11,52%, sedangkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian hanya 1,86%. Dibandingkan dengan tahun 2011 kontribusi sektor primer mengalami penurunan sebesar 0,46% dari 11,98% pada tahun 2011 menjadi 11,52% pada tahun 2012.

Kelompok sektor tersier masih merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Jawa Barat yaitu sebesar 44,04%, sektor tersier mengalami kenaikan sebesar 1,74% dari 42,30% pada tahun 2011 menjadi 44,04% pada tahun 2012.

Kontribusi terbesar sektor tersier adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 23,90%, sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa kontribusi masing-masing sebesar 7,79%, 2,95%, dan 9,40%.

Tabel 4.3
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat
Menurut Kelompok Sektor/Sektor Tahun 2011-2012

Kelompok Sektor/Sektor	2011	2012
(1)	(2)	(3)
1. PRIMER	-0,13	-0,24
1) Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan	-0,01	-0,09
2) Pertambangan dan penggalian	-0,12	-0,15
2. SEKUNDER	3,16	2,36
3) Industri pengolahan	2,61	1,65
4) Listrik, Gas dan air bersih	0,03	0,17
5) Bangunan/konstruksi	0,52	0,53
3. TERSIER	3,45	4,09
6) Perdagangan, hotel dan restoran	1,76	2,55
7) Pengangkutan dan komunikasi	0,71	0,62
8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,44	0,36
9) Jasa-jasa	0,53	0,56
Laju pertumbuhan ekonomi	6,48	6,21

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2012 kelompok sektor yang memberikan sumbangan pertumbuhan terbesar adalah kelompok sektor tersier (4,09%) disusul kelompok sektor sekunder (2,36%). Sedangkan kelompok sektor primer memberikan sumbangan pertumbuhan negatif yaitu sebesar -0,24%. Apabila dilihat berdasarkan sektornya maka sektor pertumbuhan terbesar pada tahun 2012 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (2,55%) dan sektor industri pengolahan (1,65%)

B Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ)

Hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa setidaknya terdapat empat sektor di Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai $LQ > 1$ antara lain sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih, sektor perdagangan, hotel serta restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir separuh sektor di Provinsi Jawa Barat dapat menjadi sektor basis bagi pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional. Selama kurun waktu 2010-2012, perekonomian sektoral Provinsi Jawa Barat menunjukkan kinerja keunggulan komoditas yang dapat dipertahankan secara konsisten. Hasil ini tidak lepas dari kenyataan bahwa kabupaten-kabupaten yang masuk kedalam Provinsi Jawa Barat merupakan kabupaten kunci yang justru memberikan nilai tambah paling besar terhadap perekonomian Jawa Barat.

Besarnya nilai $LQ > 1$ di pada empat sektor juga mengindikasikan bahwa produksi output Jawa Barat mengalami surplus atau memproduksi output melebihi proporsi yang dibutuhkan provinsi dan memberikan sumbangan output bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut dapat menjadi sektor basis atau sektor kunci bagi pengembangan sektor lainnya. Sektor basis utama di provinsi ini adalah listrik dan air bersih dengan nilai rata-rata LQ sebesar 3,37. Tabel perhitungan selengkapnya disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
LQ PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku 2000
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012

No	Lapangan Usaha	Hasil Perhitungan		
		LQ 2010	LQ 2011	LQ 2012
1	Pertanian	0,8241	0,8146	0,7977
2	Pertambangan dan Penggalian	0,1805	0,1528	0,1577
3	Industri Pengolahan	1,5241	1,5274	1,4952
4	Listrik dan Air Bersih	3,6222	3,3313	3,1739
5	Bangunan	0,3672	0,3926	0,4105
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,6352	1,6370	1,7191
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1,0787	1,1641	1,1699
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,3789	0,3944	0,4059
9	Jasa-jasa	0,8644	0,8683	0,8716
	PDRB/PDB			

Sumber : data diolah

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua sebagai tempat favorit penanaman modal asing selama tahun 2011 setelah Provinsi DKI Jakarta. Nilai investasi di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar \$ 3,8 miliar atau 19,7 persen dari total PMA 2011. Investasi di Provinsi Jawa Barat meliputi sektor energi (pembangkit listrik), bahan kimia, energi panas bumi dan sektor jasa. Kondisi ini sesuai dengan hasil analisis LQ yang menyatakan bahwa sektor basis di Jawa Barat adalah sektor listrik dan air bersih.

Sektor lainnya yang menjadi unggulan adalah sektor industri pengolahan. Tingginya penerimaan di sektor ini tidak terlepas dari banyaknya investasi yang sudah dilakukan, baik penanaman modal asing

maupun penanaman modal dalam negeri. Data menyatakan bahwa realisasi investasi berdasarkan lokasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan investasi sekitar Rp11,2 triliun atau 14,7 persen dari total PMDN 2011 yang mencapai Rp76 triliun. Daerah penyerap PMDN berikutnya yaitu Jawa Timur sebesar Rp9,7 triliun atau 12,7 persen dari total investasi PMDN, disusul DKI Jakarta Rp9,3 triliun atau 12,2 persen, dan berturut-turut Provinsi Riau Rp7,5 triliun, Provinsi Kalimantan Timur Rp6,6 triliun. Realisasi investasi pada triwulan I tahun 2012, secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 198.817 orang. Investasi PMA dengan 412 proyek menyerap 179.005 tenaga kerja, dan 76 proyek PMDN menyerap 19.762 tenaga kerja.

Berdasarkan daerah tujuan, minat investasi untuk PMA triwulan I tahun 2012 yang nilainya terbesar adalah Kabupaten Karawang sebesar Rp 3,33 triliun, disusul Kabupaten Cianjur Rp 2,22 triliun. Sedangkan untuk PMDN minat investasi terbesar di Kab Bogor sebesar Rp 1,9 triliun, lalu Kab Karawang Rp 1,2 triliun, dan Kab Bandung Barat sebesar Rp 225 miliar. Dari sisi asal negara PMA, minat investasi triwulan I tahun 2012 hanya ada 7 negara. Terbesar adalah dari Jepang, jumlah proyeknya 4 dengan penyerapan 2.745 tenaga kerja.

Tabel.4.5
Peringkat Investasi PMA Di Jawa Barat Menurut Negara Asal
Sampai Dengan Periode Laporan Jan-Des 2011

Rank	Negara Asal	Jumlah Proyek	Jumlah Investasi	Jumlah Investasi (Rp.)	TKI	TKA	TK (TKI+TKA)
1	Jepang	245	1.294.744.621	12.170.599.440.456	113.98	709	114.689
2	Singapura	42	105.345.648	990.249.089.039	42.264	231	42.495
3	Korea Selatan	50	115.916.178	1.089.612.077.457	32.855	276	33.131
4	India	4	45.458.900	427.313.660.000	112	14	126
5	Belanda	6	28.583.004	268.680.238.892	1.725	4	1.729
6	Malaysia	17	21.516.146	202.251.767.812	282	42	324
7	Jerman	5	10.567.409	99.333.644.600	982	11	993
8	Amerika	3	4.090.000	38.446.000.000	689	16	705
9	Taiwan	5	1.392.463	13.089.152.200	967	12	979
10	Australia	9	914.582	8.597.071.740	3.516	20	3.536
11	Inggris	6	877.188	8.245.571.474	3.901	30	3.931
12	China	3	159.021	1.494.797.450	3.211	27	3.238
13	Prancis	19	0	0	250	1	251
14	Hongkong	2	0	0	736	1	737
15	Belgia	2	0	0	110	2	112
16	Mauritius	2	0	0	154	1	155
17	Swiss	2	0	0	30	0	30
18	Italia	1	0	0	12	5	17
19	Gab. Negara	194	2.779.544.469	26.127.718.007.570	72.889	646	73.535
JUMLAH		617	4,409,109,630	41,445,630,518,690	278,665	2,048	280,713

Sumber : Deperindag, 2013

Menurut Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Jabar, kegiatan penanaman modal para investor Jepang di Jawa Barat, paling tidak dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Malah pada tahun 2011 total realisasi investasi PMA Jepang menggeser PMA Korea Selatan, yang secara tradisional selalu peringkat pertama dalam hal realisasi investasi di Jawa Barat. Tabel 4.6. memberikan gambaran jumlah industri di Indonesia.

Tabel 4.6
Jumlah Industri di Jawa Barat

Golongan Industri	Jumlah Industri	Jumlah Tenaga Kerja
Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya	236	31758
Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Nuklir	11	679
Industri Pakaian Jadi	663	201140
Industri Kendaraan Bermotor	155	41275
Industri Mesin dan Perlengkapannya	175	41165
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	255	47287
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	219	47318
Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	61	23506
Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data	4	2607
Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	348	74056
Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu	196	16994
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya	529	78651
Industri Makanan dan Minuman	1143	108093
Industri Mesin Listrik Lainnya, dan Perlengkapannya	94	28039
Industri Barang Galian Bukan Logam	765	60265
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya	89	26881
Daur Ulang	28	1154
Industri Pengolahan Tembakau	12	545
Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya	81	41361
Industri Logam Dasar	37	7867
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	90	9416
Industri Tekstil	987	244209
Industri Peralatan Kedokteran, Alat Cukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng	17	11363

Banyaknya industri yang ada di Jawa Barat memberikan nilai tambah bagi perekonomian di Jawa Barat. Kehadiran pabrik-pabrik memberikan peluang pekerjaan untuk masyarakat di sekitar dan memberikan *multiplier effect* bagi peningkatan peluang seperti pedagang kaki lima. Dengan demikian masyarakat tidak perlu lagi keluar kota untuk mencari pekerjaan.

Sektor unggulan lain berkaitan dengan sektor basis adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hasil ini sesuai dengan kondisi pariwisata di Jawa Barat. Jawa Barat dikenal dengan keindahan alamnya yang mempesona. Berikut ini beberapa objek wisata unggulan yang terdapat di Provinsi Jawa Barat:

- Gunung Tangkuban Perahu
- Kawah Putih
- Pantai Pangandaran
- Situs Batujaya
- Green Canyon (Cukang Taneuh)
- Kampung Naga
- Keraton Kanoman
- Keraton Kasepuhan
- Situ Patengang
- Gua Pawon

Keberadaan beberapa tempat pariwisata tersebut menumbuhkan peluang sektor lain untuk berkembang, antara lain perhotelan dan restoran. Dengan demikian masyarakat akan dapat mendapatkan nilai tambah dengan pertumbuhan ekonomi tersebut.

C. Analisis Shift Share

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga berlaku 2000 propinsi Jawa Barat tahun 2010-2012. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis shift share diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7
Perhitungan Shift Share Secara Sektoral Menurut Lapangan Usaha Propinsi
Jawa Barat Tahun 2010-2012

No	Propinsi	Indikator	Sektor								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jawa Barat	G	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		M	-	+	-	+	+	+	+	+	+
		S	-	-	-	-	+	+	+	+	-
		M + S	-	-	-	-	+	+	+	+	+

Sumber : Data diolah

Keterangan :

Sektor

- 1 : pertanian
- 2 : pertanian dan galian
- 3 : industri
- 4 : listrik dan air bersih
- 5 : bangunan
- 6 : perdagangan, hotel dan restoran
- 7 : pengangkutan, hotel dan komunikasi
- 8 : keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- 9 : jasa-jasa
- G : Pertumbuhan ekonomi (economic growth), merupakan komponen “share” untuk melihat perubahan perekonomian daerah dibandingkan dengan perekonomian provinsi.
- M : Pergeseran proporsional (industry mix) bauran industri atau proportional shift, untuk melihat apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian nasional.
- S : Pergeseran differential (regional share/differential shift/keunggulan kompetitif), untuk melihat seberapa jauh daya saing sektoral suatu daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional.
- M+S : Komponen shift

Dengan melihat nilai M + S yang mempunyai nilai positif adalah untuk sektor bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa . Nilai M + S positif artinya pertumbuhan lapangan usaha tersebut pertumbuhannya lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan lapangan usaha dari sektor tersebut secara nasional.

Pertumbuhan suatu sektor, bukan hanya dilihat dari pengaruh eksternal saja, tetapi tergantung pula pada kondisi lokal daerah secara intern. Pertumbuhan ekonomi daerah yang disebutkan karena pengaruh internal ini dapat dilihat pada nilai S . Apabila nilai S positif berarti sektor tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang sektor yang sama pada perekonomian di tingkat nasional, dan sebaliknya nilai S negatif berarti suatu sektor di daerah pertumbuhan lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan nasional untuk sektor yang sama.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil perhitungan analisis *Location Quotient* (LQ) terdapat 4 (empat) sektor yang merupakan sektor basis/potensial di propinsi Jawa Barat yaitu sektor industri pengolahan, listrik dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi.
2. Sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor perdagangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan lebih cepat dibanding tingkat pertumbuhan nasional.

B. Implikasi

Dengan melihat peranan sektor-sektor basis yang semakin besar peranannya terhadap PDRB diharapkan pembangunan sektor-sektor tersebut diusahakan untuk memberi nilai tambah pada kegiatan ekonomi dan sekaligus memberikan kesempatan kerja yang semakin luas dan produktif bagi penduduk yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan(daya beli) masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L, 1989. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, 2006, *Jawa Barat Dalam Angka*, BPS Proinsi Jawa Barat, Bandung
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, 2011, *Jawa Barat Dalam Angka*, BPS Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, 2012 *Jawa Barat Dalam Angka*, BPS Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, 2013, *Jawa Barat Dalam Angka*, BPS Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- Irawan. 1992, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta.
- Kuncoro. M, 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Teori, Masalah dan Kebijakan. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro. M, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro. M, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga Jakarta.
- Sambodo, H. 1998. Pergeseran Sektor Primer ke non Primer, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Antar Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis S-2*. Fakultas Pertanian, Unibraw Malang.
- Sjafrizal, 1997, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Tengah, *Prisma*, No. 3, 27-28.
- Todaro, Michael P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P, and Stephen C. Smith (2003), *Economic Development*, Eight Edition, Boston : Addison Wesley.

Lampiran 1. Hasil Perhitungan Analisis Basis Per Sektor Propinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012

No.	LAPANGAN USAHA	JAWA BARAT			INDONESIA			HASIL PERHITUNGAN		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	LQ 2010	LQ 2011	LQ 2012
1	Pertanian	97.194,38	103.131,44	109.094,87	985.470,50	1.091.447,30	1.190.412,40	0,8241	0,8146	0,7977
2	Pertambangan dan Penggalian	15.546,26	17.362,82	17.581,18	719.710,10	979.505,40	970.599,60	0,1805	0,1528	0,1577
3	Industri Pengolahan	291.688,08	319.983,63	338.881,03	1.599.073,10	1.806.140,50	1.972.846,60	1,5241	1,5274	1,4952
4	Listrik dan Air Bersih	21.294,46	21.943,28	23.746,25	49.119,00	56.788,90	65.124,90	3,6222	3,3313	3,1739
5	Bangunan	29.047,79	34.358,94	40.600,00	660.890,50	754.483,50	860.964,80	0,3672	0,3926	0,4105
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	172.713,20	194.431,79	226.258,61	882.487,20	1.024.009,10	1.145.600,90	1,6352	1,6370	1,7191
7	Pengangkutan dan Komunikasi	54.635,68	66.336,49	73.802,07	423.172,20	491.283,10	549.115,50	1,0787	1,1641	1,1699
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	21.155,31	24.479,92	27.913,24	466.563,80	535.152,90	598.523,20	0,3789	0,3944	0,4059
9	Jasa-jasa	68.318,68	78.953,68	88.983,52	660.365,50	783.970,50	888.676,40	0,8644	0,8683	0,8716
	PDRB/PDB	771.593,84	860.981,99	946.860,77	6.446.851,90	7.422.781,20	8.241.864,30			

Sumber : data diolah

Lampiran 2. Hasil Perhitungan Shift Share Per Sektor Propinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012

No.	Lapangan Usaha	Jawa Barat		Indonesia		Y _t /Y _o	Y _{it} /Y _{to}	y _{it} /y _{to}	G	M	S	M + S
		2010	2012	2010	2012							
1	Pertanian	97.194,38	109.094,87	985.470,50	1.190.412,40	1,28	1,21	1,12	27.062,06	-6.849,18	-8.312,39	-15.161,57
2	Pertambangan dan Galian	15.546,26	17.581,18	719.710,10	970.599,60	1,28	1,35	1,13	4.328,58	1.090,81	-3.384,48	-2.293,66
3	Industri Pengolahan	291.688,08	338.881,03	1.599.073,10	1.972.846,60	1,28	1,23	1,16	81.215,41	-13.035,12	-20.987,34	-34.022,46
4	Listrik dan Air Bersih	21.294,46	23.746,25	49.119,00	65.124,90	1,28	1,33	1,12	5.929,07	1.009,94	-4.487,22	-3.477,28
5	Bangunan	29.047,79	40.600,00	660.890,50	860.964,80	1,28	1,30	1,40	8.087,85	705,92	2.758,44	3.464,36
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	172.713,20	226.258,61	882.487,20	1.145.600,90	1,28	1,30	1,31	48.088,95	3.405,52	2.050,94	5.456,46
7	Pengakutan dan Komunikasi	54.635,68	73.802,07	423.172,20	549.115,50	1,28	1,30	1,35	15.212,34	1.048,17	2.905,88	3.954,05
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	21.155,31	27.913,24	466.563,80	598.523,20	1,28	1,28	1,32	5.890,32	93,09	774,52	867,61
9	Jasa-jasa	68.318,68	88.983,52	660.365,50	888.676,40	1,28	1,35	1,30	19.022,13	4.597,97	-2.955,26	1.642,71
	Jumlah	771.593,84	946.860,77	6.446.851,90	8.241.864,30							

Sumber : Data diolah